

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari evaluasi pelaksanaan program Bedah Rumah Tinggal Rakyat Tidak Layak Huni (BERARTI) di Kabupaten TTU ini antara lain:

#### **1. Efektifitas Pencapaian Tujuan**

Tujuan program cukup efektif tercapai atau dengan kata lain banyak membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin, dilihat dari belum meningkatnya setiap kondisi rumah dan penyediaan sarana-prasarananya. Meskipun, program ini berperan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sebesar 34 % dari total 3.368 unit rumah yang ditargetkan pada tahap I pelaksanaan Program BERARTI ini. Hal ini terjadi karena adanya pemotongan anggaran untuk mengatasi kejadian luar biasa dan tak terduga yang melanda yaitu pandemic Covid-19.

#### **2. Ketepatan Kelompok Sasaran**

Tingkat ketepatan kelompok sasaran pelaksanaan program BERARTI cukup tinggi, sebesar 92,86% tepat sasaran masyarakat miskin yang tinggal pada rumah tidak layak huni. Ketepatan sasaran yang cukup tinggi ini dikarenakan pada tahap pendataan calon penerima bantuan dilakukan langsung oleh Desa berdasarkan data dari RT/RW, yang kemudian diverifikasi kembali sebelum bantuan benar-benar diberikan.

### 3. Efisiensi Pelaksanaan Program

Efisiensi pelaksanaan program BERARTI diwujudkan dalam terselenggaranya kepanitiaan program tingkat Kabupaten, kelurahan/Desa, dan kelompok kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mekanisme pelaksanaan program BERARTI juga dapat berjalan dengan cukup efisien. Namun masih ada kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut yaitu kepanitiaan tingkat kabupaten belum seluruhnya berperan dalam setiap program yang dilaksanakan pada setiap Desa. Peran kepanitiaan tingkat Kabupaten berkaitan erat dengan bantuan yang diterima pada tiap Desa. Semakin banyak kerjasama yang dilakukan dinas/lembaga pada kepanitiaan tingkat kabupaten, semakin banyak bantuan yang diterima, sehingga semakin banyak pula perbaikan yang didapatkan masyarakat.

### 4. Kecukupan Pelaksanaan Program BERARTI

Kecukupan pelaksanaan program BERARTI yang dinilai dari keberhasilan program berdasarkan aspek fisik, ekonomi, dan sosial tercapai sebesar 57,14%. Keberhasilan ini masih belum begitu tinggi dikarenakan program BERARTI ini belum dapat memenuhi setiap aspek pembangunan perumahan. Aspek fisik hanya dapat dicapai sebesar 57,14%, aspek ekonomi tercapai 28,57%, dan aspek sosial tercapai 85,72%. Pencapaian yang tidak terlalu tinggi pada ketiga aspek ini dikarenakan terbatasnya bantuan yang diberikan, tanpa bantuan lain yang bisa mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Sedangkan untuk peningkatan aspek sosial mendapatkan pencapaian tertinggi dibandingkan dengan aspek

lainnya karena pelaksanaan program ini berhasil meningkatkan kerjasama serta keswadayaan masyarakat melalui gotong-royong yang dilakukan pokja bersama dengan masyarakat penerima bantuan.

#### 5. Responsivitas Masyarakat

Tingkat responsivitas masyarakat atas program perbaikan rumah tidak layak huni ini telah memuaskan harapan, persepsi, atau nilai masyarakat. Kesesuaian harapan dalam pelaksanaan program belum cukup tinggi, dengan pencapaian sebesar 42,86%, manfaat yang dirasakan masyarakat dari pelaksanaan program sebesar 64,28%, dan kecilnya permasalahan/ kendala yang muncul di masyarakat sebesar 5,36%.

### **B. Saran**

#### **1. Saran Umum**

Berdasarkan hasil evaluasi program bedah rumah tidak layak huni di Kabupaten TTU, pelaksanaan program BERARTI masih belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni ini diperlukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu adanya kerjasama antar dinas pemerintahan secara terpadu, dalam bentuk kerjasama program-program fisik seperti perbaikan rumah maupun sarana prasarana dengan program-program peningkatan ekonomi, namun pelaksanaannya tetap melibatkan masyarakat dengan dikoordinatori lembaga keswadayaan masyarakat itu sendiri. Kerjasama dinas-dinas tersebut diharapkan bisa maningkatkan setiap komponen pembangunan perumahan yang berkelanjutan

(pemberdayaan fisik, ekonomi, dan sosial) sehingga pelaksanaan program benar-benar mewujudkan perumahan yang berkelanjutan.

- b. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dari pemerintah perlu ditingkatkan, karena dengan selalu melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan program dapat memberikan hal positif seperti ketepatan sasaran program, kesesuaian pelaksanaan program terhadap kebutuhan, serta keterlibatan tersebut menjadi pembelajaran masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah kelompoknya sendiri sehingga dapat membangun kelompok/komunitasnya menjadi lebih baik. Dalam hal ini diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam proses pembangunan tanpa paksaan dari pihak manapun.
- c. Agar program BERARTI dapat berkelanjutan perlu diupayakan penyuluhan/ sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya memiliki rumah sehat yang layak huni sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga rumahnya serta selalu terlibat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan perumahan, baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri.
- d. Untuk kerjasama dengan lembaga diluar pemerintahan, perlu dipertimbangkan lagi bentuk bantuan serta mekanisme serta besarnya bantuan yang diberikan. Karena untuk pinjaman uang dengan besar yang cukup besar masyarakat kesulitan mengembalikan. Ada juga masyarakat yang tidak mau karena bantuan tersebut besarnya mengikat hanya boleh digunakan untuk perbaikan rumah.

- e. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik, agar dapat memberikan umpan balik dalam proses pelaksanaan program, serta menjadi koreksi selanjutnya untuk pengembangan program atau pelaksanaan program yang sejenis.

## **2. Saran Khusus**

Untuk meningkatkan capaian masing-masing kriteria, diperlukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tujuan program yang terdapat dalam Peraturan Bupati TTU No. 13 Tahun 2019 yaitu “meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten TTU” perlu lebih diperjelas atau dispesifikkan. Karena tujuan tersebut menimbulkan makna bias dan memunculkan harapan yang besar atas pelaksanaan program ini. Dan untuk mengukur tercapainya tujuan program mejadi sulit.
- b. Ketepatan kelompok sasaran yang cukup tinggi perlu ditingkatkan lagi dengan selalu adanya verifikasi dari pihak kabupaten, kelurahan/desa maupun kelompok kerja, agar pelaksanaan program ini selalu tepat sasaran.
- c. Tingkat efisiensi pelaksanaan program yang masih belum maksimal dikarenakan belum efisiennya kepanitiaan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan program pada tiap lokasi penerima bantuan. Maka perlu adanya peningkatan kerjasama antar dinas maupun antara dinas dengan lembaga di luar pemerintah, sehingga terselenggara kepanitiaan yang terpadu.
- d. Tingkat kecukupan pelaksanaan program yang masih rendah disebabkan karena belum setiap aspek pembangunan perumahan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan belum tersentuh pada setiap pelaksanaan program.

Pemberdayaan fisik dan sosial yang dilakukan tanpa pemberdayaan ekonomi bisa menyebabkan masyarakat merasakan kesulitan dalam perawatan rumah pasca pelaksanaan program tersebut. Apabila penghuni dari rumah-rumah yang telah menjadi rumah layak huni tersebut tidak bisa melakukan perawatan terhadap rumahnya, rumah tersebut bisa kembali menjadi rumah tidak layak huni. Karena itu pemberdayaan ekonomi perlu dilakukan sebagai program dampingan, agar ekonomi masyarakat dapat meningkat sehingga dapat merawat kondisi rumahnya secara berkelanjutan.

- e. Respon masyarakat yang baik terkait erat dengan kesesuaian harapan mereka atas hasil dari pelaksanaan program. Maka, keterlibatan masyarakat dari tahap awal pelaksanaan program hingga selesai perlu ditingkatkan. Aspirasi masyarakat perlu dihimpun sejak awal agar pelaksanaan program sama-sama memberikan keuntungan, baik bagi masyarakat penerima bantuan, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya.

### **3. Saran Untuk Studi Lanjut tentang Pelaksanaan Program BERARTI**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, masih dijumpai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan program Bedah Rumah Tidak Layak Huni serta melihat arti penting pelaksanaan program bedah rumah tinggal rakyat tidak layak huni bagi permasalahan perumahan dan permukiman di Kabupaten TTU bagi masyarakat miskin, maka studi lanjut yang dapat dilakukan terkait dengan pelaksanaan program ini adalah:

- a. Studi efektifitas dan efisiensi peran kelembagaan dalam program Bedah Rumah.

- b. Studi alternatif bentuk kerjasama program Bedah Rumah dengan lembaga di luar pemerintahan.
- c. Studi alternatif pembiayaan pembangunan perumahan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2004. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, S dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teori Praktis Bagi Mahasiswa Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Atmajha, M.C. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Tanjungpinang*, (online) ([http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity\\_forms/JURNALfix-pdf](http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/JURNALfix-pdf), diakses 20 april 2020)
- Badan Pusat Statistik Timor Tengah Utara. 2016. *Timor Tengah Utara Dalam Angka*. Kefamenanu: BPS
- Dunn, W. N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC USA: Congressional Quartes Press.
- Febri, Muhamad. 2020. *Implementasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah di Kota Padang*. Jurnal JOM FISIP Vol 7 Edisi I Januari 2020
- Ghafaralie, B. 2015. *Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, FISIP UMRAH.
- Hindarto, P. 2007. *Inspirasi Rumah Sehat di Perkotaan*. Yogyakarta: Andi Offfset
- Ingriani. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Dharmasraya*. Jurnal JOM FISIP volume 2 No.2 Oktober 2015
- Isaac, Stephen dan William B. Michael. 1984. *Handbook in Research and Evaluation for Education and Behavioral Sciences 2<sup>nd</sup> ed*). San Diego : Edist Publisher [www.evaluasipendidikan.blogspot.com](http://www.evaluasipendidikan.blogspot.com).<http://celotehaziz.blogdetik.com/files/2010/evaluasi-terhadap-produk-perpustakaanI.pdf>. (online) diakses tanggal 18 april 2020.
- Kartasmita, Ginanjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Yogyakarta: UGM
- Kirkpatrick, D.L. 1996. *Evaluating Training Programs*. San Fransisco: Bereet-Kohler Publisher



- Nawi, ahmad, asih widi lestari. 2018. *Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu*. Jurnal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962. Vol. 7, No. 1 (2018). Hal (11-16)
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Parson, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Publik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Utama.
- Pasolog, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Patton, Carl V. dan Sawicki David S. 1986. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New Jersey: Prentice-Hall Englewood Cliffs.
- Sitorus, Tiurma P. Natalina. (2002). *Implementasi program peningkatan penanggulangan kemiskinan (Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam/UED-SP)*. Tugas Akhir tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana Universitas Gajah Madah
- Subarsono, A.G. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi dkk. 2003. *Isu-Isu Pembangunan Sosial*. Jakarta: PT. Grafindo Group.
- Suharto, Edi. 2005. *Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Balatbangsos.
- Tayibnapis, F. 2000. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Jakarta: Rhineka Cipta
- Utami, S. 2012. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan RIAU*. Tugas Akhir tidak untuk dipublikasikan. Program Pascasarjana Universitas terbuka Batam
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Winarno, B. 2018. *Evaluasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kabupaten Belitung*. Jurnal Pengembangan Kota. Vol 6 (1): 66-74. DOI: 10.14710/jpk.6.1.66-

Worthen, B.R dan Sanders. 1979. *Educational Avaluation: Theory and Practice*.  
Wadsort: Belmont, C.A.

Yossyafra, Y & Melinda Noer. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan Program Bedah Rumah di  
Kota Padang*. Prosiding-Seminar-Nasional-Perencanaan-Pembangunan-Inklusif-  
Desa-Kota ISBN: 978-602-73463-1-4

### **Peraturan Perundang-undangan**

Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan Sarana  
Lingkungan Tahun 2014

Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 13 tahun 2019 Tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Program Bedah RUmah Rakyat Tidak Layak Huni (BERARTI)

Laporan Akhir Penyusunan Strategi Pemukiman & Infrastruktur Perkotaan Kabupaten  
Timor Tengah Utara Tahun 2012